

LAPORAN
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



**ANALISIS E GOVERNMENT PADA SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO**

Tim Peneliti:

Junadi, S.Sos., M.Si
Ana Kumalasari, S.AP, M.A.P
Juwita Wantika

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026


Nomor Kontrak : 025 / LPPM /-LIT / UB / XI/ 2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1.	Judul Penelitian	:	Analisis E-Government Pada Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Peneliti	:	Junadi, S.Sos.,M.Si
	b. NIDN	:	0706036901
	c. Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
	d. E-mail	:	
	e. Bidang Keilmuan	:	Sosial Humaniora
3.	Anggota Peneliti 1		
	a. Nama Dosen	:	Ana Kumalasari, S.A.P.,M.A.P
	b. NIDN	:	0720089402
	c. Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
	d. E-mail	:	anakumala30@gmail.com
	e. Bidang Keilmuan	:	Sosial Humaniora
	Anggota Peneliti 2		
	a. Nama Mahasiswa	:	Juwita Wantika
	b. NIM	:	21632011135
	c. Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
	d. E-mail	:	
	e. Bidang Keilmuan	:	Sosial Humaniora
4.	Jangka Waktu Penelitian	:	6 Bulan
6.	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Bojonegoro
7.	Dana Diusulkan	:	3.000.000
Mengetahui,			Bojonegoro, 23 Februari 2026
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro			Pengusul,
			
<u>Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.</u> NIDN 07 2108 8601			<u>Junadi, S.Sos.,M.Si</u> NIDN. 07 0603 6901

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil'alamin, peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan hingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : Analisis E-Government Pada Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. Shalawat beriring salam peneliti hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat Tri Darma Perguruan Tinggi dalam konteks penelitian.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.2 Penelitian Terdahulu.....	8
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
3.2 Lokasi Penelitian	10
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	10
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	11
3.5 Analisis Data	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Hasil Penelitian.....	14
4.2 Pembahasan	17
BAB V PENUTUP	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	8
--------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Figure 2.3 1 Kerangka Konsep Penelitian	9
---	---

RINGKASAN

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi proses administratif, tetapi juga transformasi struktur dan budaya birokrasi agar lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Keberhasilan e-government dipengaruhi oleh kualitas sistem, kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, regulasi pendukung, dan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu implementasi e-government di Indonesia, terutama dalam bidang pelayanan perizinan berusaha. OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan melalui satu pintu digital, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, dan pemenuhan komitmen secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan menciptakan layanan perizinan yang cepat, transparan, berstandar nasional, serta terhubung antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi OSS masih menghadapi tantangan seperti kesiapan SDM, infrastruktur digital, sinkronisasi data, dan literasi pengguna. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan sebagai pelaksana utama pelayanan perizinan di daerah, termasuk operasionalisasi OSS. DPMPTSP bertanggung jawab memberikan pendampingan bagi pelaku usaha, memverifikasi dokumen, mengoordinasikan perizinan lintas instansi, dan memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan. Rencana luaran penelitian ini Adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi sinta 2.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk bertransformasi dari pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis elektronik atau *e-government*. Melalui *e-government*, pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Salah satu bentuk implementasi *e-government* di bidang perizinan adalah penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara nasional. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah dengan potensi investasi yang cukup besar di sektor migas, pertanian, dan UMKM (Sholikin, 2024) memerlukan sistem pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Implementasi OSS diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan, mengurangi tatap muka, mempercepat waktu layanan, serta meminimalkan praktik-praktik non-transparan dalam pelayanan publik.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa pelayanan perizinan berusaha pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pelayanan perizinan yang membagi tingkat usaha menjadi beberapa tingkat risiko dan menyesuaikan perizinan berdasarkan tingkat risiko tersebut. OSS adalah singkatan dari Online Single Submission, ini merupakan sebuah bentuk perizinan untuk melakukan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis perizinan usaha ke dalam satu platform online. Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online

Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini dimulai pada tahun 2018 dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang lebih ramah bagi pelaku bisnis di Indonesia. OSS berbasis Risiko, atau yang dikenal sebagai Online Single Submission merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sistem ini resmi berlaku sejak 2 Juli 2021 dan kini menjadi platform perizinan usaha yang paling update, dari yang sebelumnya OSS versi 1.0 dan OSS versi 1.1. Adanya OSS juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi besar-besaran yang harapannya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Keunggulan yang paling dapat dilihat dari sistem OSS yaitu efisiensi dalam hal waktu dan biaya (*No Title*, n.d.).

Berdasarkan catatan observasi pra penelitian, peneliti menemukan bahwa beberapa masyarakat masih belum memahami tata cara menggunakan atau mendaftarkan diri dengan sistem OSS (*Online Single Submission*), serta cara melakukan perizinan melalui *Online Single Submission*. Akibatnya, banyak masyarakat yang datang langsung ke dinas terkait untuk meminta bantuan kepada operator. Dengan demikian, permasalahan yang muncul terkait dengan lemahnya pemahaman masyarakat tentang sistem *Online Single Submission*.

Maka penting adanya untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait kajian efektivitas dalam pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission*. Efektivitas dapat diartikan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau sistem mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat lima indikator yang dikemukakan (Campbell, 1989) : a) Keberhasilan program, yaitu efektivitas program dapat dicapai melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari keberhasilan sistem *Online Single Submission* ini adalah mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan usaha bagi pelaku usaha di Indonesia. Dalam hal ini beberapa pelaku usaha masih bergantung pada pihak ketiga (jasa pembuatan izin), yang menunjukkan bahwa sasaran belum sepenuhnya terpenuhi karena rendahnya literasi digital. b) Keberhasilan sasaran, yaitu target

keberhasilan mengacu pada sejauh mana peserta program memenuhi kriteria kelayakan program yang telah ditentukan. Pelaksanaan sasaran dari sistem *Online Single Submission* dapat menjangkau seluruh pelaku usaha termasuk UMKM. c) Kepuasan terhadap program, yaitu mengacu pada sejauh mana kebutuhan pengguna terpenuhi, merupakan ukuran evaluatif efektivitas program. Dalam hal ini sama halnya dengan keberhasilan program, jika keberhasilan sistem *Online Single Submission* di Kabupaten Bojonegoro telah mencapai tujuannya, maka indikator kepuasan terhadap program juga berjalan seperti itu, sebab keduanya sama-sama mempunyai tujuan yang berkesimbangan. d) Tingkat input dan output, yaitu pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan OSS seringkali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem, kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital pelaku usaha, kendala jaringan, hingga sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang merasa kesulitan menggunakan OSS secara mandiri, sehingga tetap bergantung pada bantuan petugas atau perantara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi e-government melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan pengguna layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian yang menganalisis penerapan e-government pada Sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro, baik dari aspek proses, pemanfaatan, maupun kendala yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas implementasi e-government di bidang perizinan investasi, serta memberikan masukan bagi perbaikan pelayanan ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimana Analisis E-Government Pada Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis E-Government Pada Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi pada stakeholder kebijakan mengenai bagaimana seharusnya transparansi bisa dilakukan pada pengelolaan aset desa
2. Mendukung Kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan OSS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. E-government

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, efektivitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. World Bank mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk menyampaikan layanan dan informasi kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lain secara lebih efisien dan responsif. (United Nations Department of Economic and social Affairs, 2022) menyatakan bahwa e-government bukan hanya digitalisasi sistem, tetapi transformasi proses pelayanan agar lebih sederhana, cepat, dan akuntabel (Ridwan & Nurhakim, 2014). Dengan demikian, e-government merupakan strategi pemerintahan elektronik yang bertujuan memperbaiki tata kelola (*good governance*).

Penerapan e-government memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan mutu layanan publik, mempercepat proses administrasi, menyederhanakan alur birokrasi, memperkuat transparansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi e-government dapat menurunkan biaya operasional, mempercepat pelayanan, dan mengurangi potensi praktik maladministrasi atau korupsi. Dengan adanya digitalisasi proses perizinan, pembayaran, komunikasi, dan pengaduan, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih akurat, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Keberhasilan e-government pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian *good governance*, terutama dalam hal efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.

Keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dalam aspek teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Heeks (2002) menegaskan bahwa banyak proyek e-government gagal karena adanya kesenjangan antara desain sistem dengan realitas birokrasi dan kapasitas lapangan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan e-government meliputi kualitas

sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), tingkat pemanfaatan (*use*), dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*) sebagaimana dijelaskan dalam model DeLone & McLean (Chung & Kim, 2019). Selain itu, faktor-faktor seperti kompetensi SDM, komitmen pimpinan, regulasi yang konsisten, integrasi antarinstansi, dan literasi digital masyarakat merupakan variabel penting yang menentukan efektivitas implementasi e-government. Dalam konteks pelayanan perizinan seperti OSS, keberhasilan e-government diukur melalui kecepatan layanan, kemudahan akses sistem, integrasi data pusat-daerah, minimnya kesalahan input, serta tingkat pemahaman dan kepuasan pelaku usaha sebagai pengguna utama layanan.

b. Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari reformasi birokrasi di bidang penanaman modal. OSS pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada level konsep, OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan melalui satu pintu digital, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, serta izin-izin teknis lain secara lebih cepat tanpa harus melalui banyak instansi secara terpisah. Sistem OSS mencerminkan upaya pemerintah menuju model pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif dalam mendukung iklim investasi nasional.

Dalam perspektif e-government, OSS termasuk kategori layanan *Government to Business (G2B)* yang menekankan integrasi data, digitalisasi alur pelayanan, dan otomatisasi proses untuk mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi melahirkan praktik birokrasi yang tidak efektif.

Adapun perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS adalah sebagai berikut:

- 1) Izin Lokasi merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha

untuk bisa mendapatkan hak penggunaan lahan/tanah di suatu daerah/area demi bisa menjalankan kegiatan usahanya.

- 2) Izin Lingkungan merupakan izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya memiliki dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan. Izin Lingkungan diperlukan sebagai tindakan preventif dari kerusakan alam.
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada seseorang yang akan mendirikan, membangun, mengubah, memperluas, dan memperbaiki bangunan sesuai dengan persyaratan yang ada.
- 4) Sertipkat Layak Fungsi (SFL) merupakan sertipikat yang diberikan setelah sebuah bangunan selesai dibangun dan terbukti layak untuk digunakan serta sudah sesuai dengan fungsinya. SFL diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan.
- 5) Izin Usaha merupakan izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS agar pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha ini bisa didapat setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran terhadap kegiatan usaha yang akan dilakukan atau bahkan hingga sebelum pelaksanaan komersilnya serta telah memenuhi ketentuan yang ada.
- 6) Izin Operasional/Komersil merupakan izin yang didapat oleh pelaku usaha setelah dirinya mendapatkan Izin Usaha. Izin Operasional/Komersil sendiri merupakan izin yang dimohonkan oleh pelaku usaha untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan penjualan/ perdagangan, pembelian, produksi, dan segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan. Izin Operasional/Komersil ini akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha memenuhi segala persyaratan yang ada (Setiadi et al., 2021)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan untuk mencari inspirasi baru penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

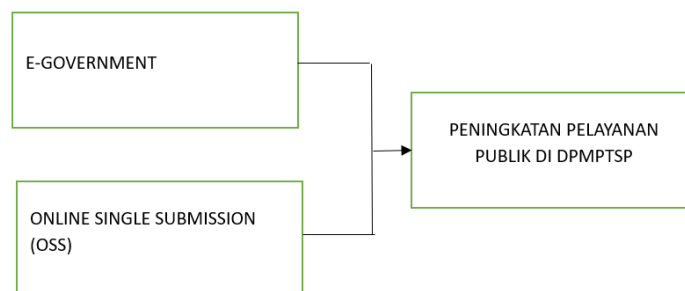
No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Efektifitas outcomes system keuangan desa berbasis e-government (Lukman, 2022)	Kualitatif	Efektifitas Outcomes dan e-government	Pemerintah mendapat manfaat dari SISKEUDES yang mempermudah pemasukan dan penyusunan laporan keuangan
2.	Implementasi e-government (Ridwan & Nurhakim, 2014)	Kualitatif	Implementasi dan e-government	Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional.
3.	Risnawati Dewi. 2017, Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	Metode penelitian kualitatif	Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan desa sudah optimal dengan dibuktikan dengan merencanakan kebutuhan desa selama 1 tahun kerja, akan tetapi masih ada penghambat seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
4.	Erna Rahmawati (2017) Peran Kepala Desa dalam	Metode penelitian kualitatif	Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan aset desa ini telah dilakukan oleh kepala desa,

	Pengelolaan Aset Desa.			sekertaris desa dan perangkat desa. Penetapan semua kebijakan mulai dari pengelolaan sampai dengan pemanfaatan aset desa ditetapkan oleh kepala desa.
5.	Ilham, Herman, (2018). Transparansi Pengelolan Dana Desa di Desa Sunggumanai, Kabupaten Gowa.	Metode penelitian kualitatif	Pengelolaan Aset Desa	Menunjukkan hasil yang cukup menghasilkan dampak positif untuk kemajuan desa. Baik hal ini dikarenakan adanya respon daya tanggap masyarakat desa Sunggumanai dan pemerintah desa, pengetahuan masyarakat tentang dana desa dilihat adanya pemahaman beberapa masyarakat yang telah mengetahui apa saja program-program yang akan dilaksanakan dan bagaimana pengalokasinya.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Figure 2.3 1 Kerangka Konsep Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau masalah dengan cara mendalam dan mendetail. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan berbagai bidang studi lainnya di mana aspek kualitatif dan interpretatif lebih relevan daripada pendekatan kuantitatif (Murdiyanto, 2020). Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitian nantinya akan berupa deskripsi narasi yang rinci dalam memaparkan data.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan empiris yang mendukung relevansi dan urgensi penelitian. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa beberapa kendala terkait penggunaan system OSS dalam pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah permasalahan seperti ketidaktertiban dalam administrasi, kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya pelibatan warga dalam proses pengelolaan aset. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset tersebut.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat di DPMPTSP dan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan sistem OSS dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP. serta tokoh masyarakat dan warga desa yang memahami atau pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi OSS.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan yang dipilih antara lain:

1. Perangkat Dinas yang memiliki wewenang
2. Masyarakat umum yang terlibat atau pernah mengakses informasi terkait OSS.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, karena pendekatan kualitatif mengandalkan prinsip kecukupan data (data saturation). Proses wawancara akan dilakukan hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi dari dokumen penggunaan OSS.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (Murdiyanto, 2020). Sumber asli dari penelitian disebut dengan informan. Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang berkompeten, seperti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Murdiyanto, 2020). Data ini diperoleh dari dokumen dan arsip resmi DPMPTSP.

Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara Mendalam (In-depth Interview)**

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara detail dari informan kunci mengenai proses transparansi dalam pengelolaan aset desa.

- **Observasi Lapangan**
Pengamatan langsung terhadap kegiatan pemerintahan desa, kondisi fisik aset desa, dan bentuk transparansi yang dijalankan (misalnya papan informasi, rapat desa, dll).
- **Dokumentasi**
Mengumpulkan data dari dokumen resmi, arsip, dan foto-foto pendukung untuk memperkuat temuan penelitian.

3.5 Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi (Murdiyanto, 2020).

1. **Reduksi Data (Data Reduction)**
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk transparansi pemerintah desa, proses pengelolaan aset, dan partisipasi masyarakat.
2. **Penyajian Data (Data Display)**
Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks yang memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan. Data yang disajikan berupa kutipan wawancara, hasil observasi, dokumentasi, serta analisis isi dokumen terkait.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)**
Tahap akhir dari proses analisis yang bertujuan untuk merumuskan makna dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait implementasi sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro. Analisis difokuskan pada lima indikator utama keberhasilan e-government, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat pemanfaatan, dan kepuasan pengguna.

a. Kualitas Sistem OSS

Kualitas sistem merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi e-government, karena berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mendukung proses pelayanan secara efektif, stabil, dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem OSS yang digunakan di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro secara umum telah mampu mendukung proses pelayanan perizinan secara elektronik. Dari aspek kemudahan penggunaan (ease of use), sistem OSS relatif mudah diakses oleh pengguna melalui jaringan internet dan dapat digunakan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), mengurus perizinan, serta memantau status permohonan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Dari aspek keandalan sistem (system reliability), sistem OSS secara umum dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung proses pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis yang dialami oleh pengguna, seperti gangguan jaringan, lambatnya akses sistem pada waktu tertentu, serta kesulitan dalam proses sinkronisasi data dengan sistem pusat. Kendala

tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem OSS masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek stabilitas dan kecepatan akses system.

Selain itu, dari aspek integrasi sistem, OSS telah mampu mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dalam satu platform elektronik. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan tanpa harus mengakses berbagai sistem yang berbeda. Dengan adanya integrasi sistem tersebut, proses pelayanan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Secara keseluruhan, kualitas sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan cukup baik, karena telah mampu mendukung proses pelayanan perizinan secara elektronik. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam aspek stabilitas sistem dan infrastruktur jaringan untuk meningkatkan kinerja sistem secara optimal.

b. Kualitas Informasi OSS

Kualitas informasi merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana sistem OSS mampu menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, sistem OSS telah menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses perizinan, seperti persyaratan perizinan, prosedur pendaftaran, serta status permohonan izin.

Informasi yang tersedia dalam sistem OSS secara umum telah membantu pelaku usaha dalam memahami proses perizinan yang harus dilakukan. Sistem OSS juga menyediakan informasi secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan pengguna dalam mengikuti tahapan proses perizinan. Namun demikian, masih terdapat beberapa pengguna yang mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang tersedia dalam sistem OSS, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Beberapa pengguna menyatakan bahwa istilah-istilah teknis dalam sistem OSS masih sulit dipahami, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari petugas DPMPTSP dalam mengurus perizinan.

Selain itu, keterbatasan sosialisasi mengenai penggunaan OSS juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Meskipun informasi tersedia dalam sistem, tidak semua pengguna

memahami cara mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut secara optimal. Secara keseluruhan, kualitas informasi dalam sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, karena sistem telah menyediakan informasi yang relevan dan diperlukan oleh pengguna. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal penyederhanaan informasi serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi dapat dipahami dengan lebih mudah.

c. Kualitas Layanan OSS

As Kualitas layanan merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna sistem OSS. Berdasarkan hasil penelitian, DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui sistem OSS. Petugas DPMPTSP berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS. Pendampingan tersebut dilakukan melalui pelayanan langsung di kantor maupun melalui konsultasi dengan petugas. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari DPMPTSP dalam mendukung implementasi sistem OSS.

Selain itu, petugas juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan serta membantu dalam proses pendaftaran dan pengisian data dalam sistem OSS. Pelayanan yang diberikan oleh petugas dinilai cukup membantu masyarakat, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan sistem elektronik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan, seperti keterbatasan jumlah petugas serta tingginya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama pada waktu-waktu tertentu. Secara keseluruhan, kualitas layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam implementasi sistem OSS dapat dikategorikan cukup baik, karena petugas telah memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat secara aktif.

d. Tingkat Pemanfaatan OSS

Tingkat pemanfaatan merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana sistem OSS telah digunakan oleh masyarakat dalam mengurus perizinan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, sistem OSS telah digunakan oleh sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro, terutama pelaku usaha yang ingin memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha. Penggunaan sistem OSS telah membantu mempercepat proses perizinan serta mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang belum menggunakan sistem OSS secara mandiri dan masih bergantung pada bantuan petugas atau pihak lain. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital serta kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem OSS. Dengan demikian, tingkat pemanfaatan sistem OSS di Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar penggunaan sistem OSS dapat dilakukan secara mandiri.

e. Kepuasan Pengguna OSS

Kepuasan pengguna merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana pengguna merasa puas terhadap penggunaan sistem OSS dalam pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pengguna merasa bahwa sistem OSS telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Pengguna menyatakan bahwa sistem OSS telah membantu mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan. Dengan adanya sistem OSS, pengguna dapat memantau status permohonan izin secara langsung tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS, terutama bagi pengguna yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kesulitan dalam penggunaan sistem juga mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan cukup baik. Sistem OSS telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perizinan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna secara optimal.

4.2 Pembahasan

Analisis dilakukan berdasarkan lima indikator keberhasilan e-government, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat pemanfaatan, dan kepuasan pengguna. Kelima indikator tersebut merupakan komponen utama dalam model keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean, yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem elektronik sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, serta kepuasan pengguna.

a. Kualitas Sistem OSS

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala teknis yang mempengaruhi optimalisasi penggunaannya. Sistem OSS telah mampu mendukung proses pelayanan perizinan secara elektronik, memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses layanan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah memenuhi salah satu tujuan utama e-government, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pelayanan publik. Menurut teori e-government dalam (Ridwan & Nurhakim, 2014), kualitas sistem yang baik ditandai dengan kemudahan penggunaan, keandalan, serta kemampuan sistem dalam mendukung kebutuhan pengguna. Dalam konteks ini, sistem OSS telah menunjukkan kemudahan akses dan integrasi layanan perizinan dalam satu platform. Namun, kendala seperti gangguan jaringan dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan teori Heeks yang menyatakan bahwa keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kesesuaian antara desain sistem dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, meskipun sistem OSS telah berjalan dengan baik, peningkatan infrastruktur dan stabilitas sistem masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem secara optimal.

b. Kualitas Informasi OSS

Kualitas informasi dalam sistem OSS merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi e-government (Nim & Caretta, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, sistem OSS telah menyediakan informasi yang cukup lengkap terkait prosedur perizinan, persyaratan, serta tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Informasi tersebut membantu pengguna dalam memahami proses perizinan secara lebih jelas dan terstruktur.

Menurut model DeLone & McLean, kualitas informasi yang baik ditandai dengan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam implementasi OSS di Kabupaten Bojonegoro, informasi yang tersedia telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna, namun masih terdapat kendala dalam pemahaman informasi, terutama bagi pengguna yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah menyediakan informasi yang cukup lengkap, efektivitas informasi tersebut masih dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar informasi dalam sistem OSS dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Kualitas Layanan OSS

Kualitas layanan merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang mendukung penggunaan sistem OSS. Berdasarkan hasil penelitian, DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah

menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui pendampingan dan konsultasi terkait penggunaan sistem OSS.

Petugas DPMPSTSP berperan aktif dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS, baik melalui pelayanan langsung maupun konsultasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi e-government tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Menurut teori e-government, kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sistem serta meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan adanya pendampingan dari petugas, masyarakat dapat lebih mudah menggunakan sistem OSS, sehingga mendukung keberhasilan implementasi e-government. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada seluruh pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan OSS.

d. Tingkat Pemanfaatan OSS

Tingkat pemanfaatan sistem OSS menunjukkan sejauh mana sistem tersebut telah digunakan oleh masyarakat dalam mengurus perizinan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, sistem OSS telah digunakan oleh sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bojonegoro, terutama dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengurusan izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan. Penggunaan sistem OSS juga telah mengurangi ketergantungan pada pelayanan manual, sehingga mendukung transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.

Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum dapat menggunakan sistem OSS secara mandiri dan masih membutuhkan bantuan dari petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sistem OSS masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Menurut teori e-government, tingkat penggunaan sistem merupakan indikator penting dalam menilai

keberhasilan implementasi sistem elektronik. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem, maka semakin besar keberhasilan implementasi e-government.

e. Kepuasan Pengguna OSS

Kepuasan pengguna merupakan indikator akhir dalam menilai keberhasilan implementasi sistem OSS. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pengguna merasa bahwa sistem OSS telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Sistem OSS memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan secara online, sehingga menghemat waktu dan biaya. Kepuasan pengguna juga dipengaruhi oleh kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta transparansi dalam proses perizinan. Dengan adanya sistem OSS, pengguna dapat memantau proses perizinan secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi pelayanan.

Namun demikian, kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna masih menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Menurut model DeLone & McLean, kepuasan pengguna merupakan indikator utama keberhasilan sistem informasi. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem telah memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-government melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan perizinan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek kualitas sistem, kualitas informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi e-government melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan sistem OSS telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha. Dari aspek kualitas sistem, OSS telah mampu mendukung proses pelayanan perizinan secara elektronik dan memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara lebih efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari aspek kualitas informasi, sistem OSS telah menyediakan informasi yang cukup lengkap dan membantu pengguna dalam memahami prosedur perizinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang tersedia, terutama bagi pengguna yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga masih membutuhkan bantuan petugas. Dari aspek kualitas layanan, DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pelayanan yang cukup baik melalui pendampingan dan bantuan kepada masyarakat dalam menggunakan sistem OSS. Dari aspek tingkat pemanfaatan, sistem OSS telah digunakan oleh sebagian besar pelaku usaha dan membantu meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan. Dari aspek kepuasan pengguna, secara umum pengguna merasa bahwa sistem OSS telah memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam proses perizinan usaha. Secara keseluruhan, implementasi sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha. Namun, peningkatan masih diperlukan dalam aspek kualitas sistem, kualitas layanan, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar implementasi e-government dapat berjalan secara lebih optimal dan efektif.

5.2 Saran

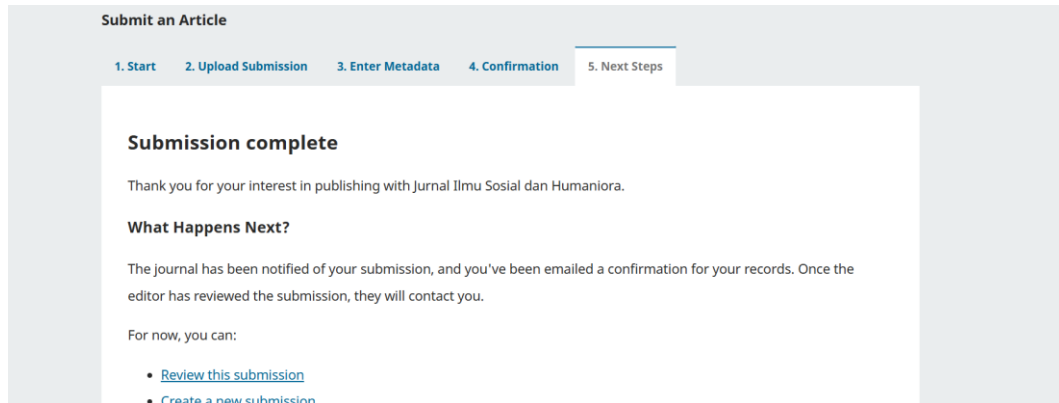
Berikut adalah beberapa saran yang relevan dengan penelitian ini :

- a. Bagi DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro : DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan jaringan untuk mendukung kelancaran penggunaan sistem OSS. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis agar petugas dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. DPMPTSP juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait penggunaan sistem OSS.
- b. Bagi Pemerintah Daerah : Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung implementasi e-government melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi serta penyediaan fasilitas yang mendukung pelayanan berbasis elektronik. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem OSS secara mandiri.
- c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha : Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan sistem OSS agar dapat memanfaatkan layanan perizinan secara mandiri. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sistem OSS secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Chung, C. S., & Kim, S. B. (2019). A comparative study of digital government policies, focusing on E-Government acts in Korea and the United States. *Electronics (Switzerland)*, 8(11). <https://doi.org/10.3390/electronics8111362>
- Lukman, J. P. (2022). Efektivitas Outcomes Sistem Keuangan Desa Berbasis E-Government di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 103–110. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v2i3.265>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALIT_AIF.docx
- Nim, E., & Caretta, T. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELESTARIAN PENYU HIJAU OLEH WORLD WILDLIFE FUND (WWF) DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS Oleh : IMPLEMENTATION OF GREEN TURTLE CONSERVATION PROGRAM POLICIES BY WORLD WILDLIFE FUND (WWF) IN PALOH laut lainnya , Penyu hi. 5.*
- No Title.* (n.d.).
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). *IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI. XI*, 403–422.
- Sholikin, A. (2024). *Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro. 2*(September), 175–185.
- United Nations Department of Economic and social Affairs. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022*. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210019446>

Bukti submit artikel



The screenshot shows a web interface for submitting an article. At the top, there is a header "Submit an Article" with a progress bar containing five steps: "1. Start", "2. Upload Submission", "3. Enter Metadata", "4. Confirmation", and "5. Next Steps". The "5. Next Steps" step is currently active. Below the progress bar, the main content area has the following text:

Submission complete

Thank you for your interest in publishing with Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

What Happens Next?

The journal has been notified of your submission, and you've been emailed a confirmation for your records. Once the editor has reviewed the submission, they will contact you.

For now, you can:

- [Review this submission](#)
- [Create a new submission](#)